



## Kajian Literatur: Pengaruh Perpajakan Untuk Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Mewujudkan SDGs 8

Dita Selsabillah<sup>1</sup>, Rifda Putri Permatasari<sup>2</sup>, Yumna Nurul Fikriyyah<sup>3</sup>  
Universitas Negeri Malang

E-mail: [dita.selsabillah.2104225@students.um.ac.id](mailto:dita.selsabillah.2104225@students.um.ac.id)

---

### Abstrak

Perpajakan dalam konteks pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 8 merupakan suatu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Penelitian ini membahas terkait bagaimana perpajakan memainkan peran penting dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Disisi lain penelitian ini juga menghubungkan tiga aspek kunci dalam pembangunan berkelanjutan seperti perpajakan, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pencapaian SDGs 8. Penelitian ini memberikan wawasan tentang kontribusi perpajakan terhadap pencapaian SDGs 8 dan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penelitian kami menggarisbawahi terkait pentingnya literasi perpajakan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Metode penelitian kami menggunakan pendekatan kajian literatur dan studi dokumenter dengan pengumpulan data melalui evaluasi literatur dan artikel terkait. Untuk data sekunder diperoleh dari sumber-sumber seperti Sinta, Scopus, Garuda, dan SainsDirect, sedangkan untuk analisis dilakukan secara deskriptif. Setelah melakukan penelitian dapat disimpulkan bahwasanya penelitian kami menekankan untuk sistem perpajakan yang efisien akan menjadi peran kunci dalam mencapai SDGs 8, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Literasi perpajakan juga diangkat sebagai faktor penting dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga penelitian ini menggarisbawahi pentingnya perpajakan yang cerdas dan seimbang dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Rekomendasi penelitian selanjutnya mencakup studi kasus negara-negara yang telah berhasil menerapkan perpajakan untuk mencapai SDGs 8, serta penyediaan contoh konkret bagaimana perpajakan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Perpajakan, Ekonomi Berkelanjutan, SDGs 8*

---

### PENDAHULUAN

Perpajakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah semua yang berkaitan dengan pajak. Sedangkan Pajak sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah retribusi wajib berupa uang yang harus dibayarkan oleh warga negara sebagai sumbangan wajib kepada negara maupun pemerintah yang berdasarkan atas pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan lain sebagainya. Dalam hal ini terdapat beberapa ahli yang mengungkapkan terkait perpajakan. Salah satunya yakni menurut Soemarso SR (2015) yang menyatakan bahwa perpajakan adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penduduk atau badan yang memiliki penghasilan atau harta tertentu, untuk



membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka memenuhi keperluan umum. Sedangkan menurut William A. Raabe, James C. Young, dan William H. Hoffman Jr (2017), perpajakan adalah pengumpulan uang oleh pemerintah dari individu dan badan usaha untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Kaitan antara pajak, SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan ekonomi berkelanjutan sangat erat. Pemerintah dapat menggunakan pendapatan pajak untuk mendanai proyek-proyek pembangunan berkelanjutan seperti infrastruktur hijau, energi terbarukan, dan transportasi berkelanjutan. Ini berkontribusi langsung pada pencapaian SDGs 8 dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pajak juga dapat digunakan untuk memberikan dukungan kepada UKM, yang sering menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Untuk mendukung terciptanya lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, pemerintah harus dapat memberikan keringanan atau pengecualian pajak kepada UKM.

Memanfaatkan sistem perpajakan yang bijaksana dan strategis, maka pemerintah dapat berperan aktif dalam mencapai SDGs 8, yang mencakup penciptaan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pajak juga dapat menjadi instrumen penting dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Perpajakan**

Perpajakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah semua yang berkaitan dengan pajak. Sedangkan Pajak sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah retribusi wajib berupa uang yang harus dibayarkan oleh warga negara sebagai sumbangan wajib kepada negara maupun pemerintah yang berdasarkan atas pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan lain sebagainya.. Dalam hal ini terdapat beberapa ahli yang mengungkapkan terkait perpajakan. Salah satunya yakni menurut Soemarso SR (2015) yang menyatakan bahwa perpajakan adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penduduk atau badan yang memiliki penghasilan atau harta tertentu, untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka memenuhi keperluan umum. Sedangkan menurut William A. Raabe, James C. Young, dan William H. Hoffman Jr (2017), perpajakan adalah pengumpulan uang oleh pemerintah dari individu dan badan usaha untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Kaitan antara pajak, SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan ekonomi berkelanjutan sangat erat. Pemerintah dapat menggunakan pendapatan pajak untuk mendanai proyek-proyek pembangunan berkelanjutan seperti infrastruktur hijau, energi terbarukan, dan transportasi berkelanjutan. Ini berkontribusi langsung pada pencapaian SDGs 8 dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pajak juga dapat digunakan untuk memberikan dukungan kepada UKM, yang sering menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Untuk mendukung terciptanya lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, pemerintah harus dapat memberikan keringanan atau pengecualian pajak kepada UKM.

Memanfaatkan sistem perpajakan yang bijaksana dan strategis, maka pemerintah dapat berperan aktif dalam mencapai SDGs 8, yang mencakup penciptaan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



Pajak juga dapat menjadi instrumen penting dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan

## **B. Ekonomi Berkelanjutan**

Jika didasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ekonomi merupakan suatu pendekatan ekonomi yang memiliki fokus tujuan pada pertumbuhan ekonomi dengan rentang waktu jangka panjang. Untuk mencapai keberlanjutan tersebut, maka harus didasarkan pada tiga pedomanan utama seperti ekonomi, lingkungan dan sosial. Pandangan Gro Harlem Brundtland (1987) terkait ekonomi berkelanjutan ini dapat digambarkan sebagai suatu pertumbuhan yang dapat memenuhi permintaan saat ini tanpa adanya pengorbanan kemampuan dari para generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Perpajakan di Indonesia berperan penting dalam ekonomi berkelanjutan, karena peran pajak disini adalah digunakan sebagai sumber pendapatan utama sebuah negara. Sehingga untuk ekonomi berkelanjutan dipergunakan pihak pemerintah sebagai cara dalam mempertimbangkan pengelolaan pendapatan pajak dengan tujuan untuk mendukung inisiatif berkelanjutan kedepannya.

Ekonomi berkelanjutan dan SDGs 8 yang telah disahkan oleh PBB memiliki keterkaitan, karena keduanya memiliki tujuan untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam hal ini, maka pertumbuhan ekonomi yang inklusif untuk kedepannya diharapkan dapat memberikan manfaat kepada seluruh lapisan elemen masyarakat tanpa terkecuali.

## **C. SDGs 8**

PBB telah menetapkan beberapa *Sustainable Development Goals*, dimana salah satunya yakni SDGs 8 yang memiliki tujuan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi secara inklusif maupun berkelanjutan. Tujuan ini bisa mencakup berbagai hal seperti penciptaan lapangan kerja yang layak, pengurangan pengangguran, dukungan terhadap perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM) serta pemberian perlindungan sosial bagi semua.

SDGs 8 bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif dan berkelanjutan dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan serta perlindungan sosial bagi semua orang. Definisi ini mencerminkan visi global untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesempatan bagi individu di seluruh dunia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang kami lakukan tergolong ke dalam salah satu jenis penelitian yakni penelitian secara kualitatif yang menggunakan pendekatan kajian literatur (*Systematic Literature Review*) serta menggunakan metode pendekatan studi dokumenter atau penelitian dalam bentuk kepustakaan yang menggunakan prosedur pengumpulan data dengan cara mengevaluasi literatur dan artikel terkait dengan hal-hal yang terkait (Nazir, 1998). Data-data penelitian yang digunakan di dalamnya merupakan data sekunder, dimana data tersebut didapat berdasarkan hasil dari penelitian para peneliti sebelumnya. Penelitian ini juga menggunakan referensi dari database elektronik yaitu Sinta, Scopus, Garuda, dan SainsDirect. Pencarian jurnal dilakukan dengan memasukkan 3 kata kunci yaitu perpajakan, SDGs 8, dan ekonomi berkelanjutan. Meskipun menggunakan metode studi dokumenter, analisis ini dapat menghindari dari kebutuhan untuk langsung terjun ke lapangan dan



bertemu secara langsung dengan responden. Studi ini mengikuti langkah-langkah dasar yang diambil untuk menyiapkan kerangka penelitian di perpustakaan sambil memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sana untuk mengumpulkan data (Zed, 2014). Data yang terkumpul kemudian diperiksa dengan menggunakan metodologi deskriptif.

**Tabel 1. Daftar Tabel Rujukan**

No.	Nama Penulis	Judul Jurnal	Tahun Publikasi
1.	Theo Kusuma Ardyaksa, Kiswanto	Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokan, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap <i>Tax Evasion</i> (2014)	2014, November
2.	Arfah Habib Saragih	Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (2018)	2018
3.	Peterson K. Ozili	<i>Does Taxation Of Digital Financial Services Adversely Affect The Financial Inclusion Agenda? Lessons From a Developing Country</i> (2018)	2018, Desember
4.	Lili Marlinah	Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional	2021
5.	Albert Albert, Rien Agustin Fadjarenie	<i>Early Tax Education: Could It Change The Future Compliance Behavior</i> (2022)	2022, Desember
6.	Irgi Iqbal, Hendra Hendra	Perspektif Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun Dalam Konsep dan Kontribusi Perpajakan Terhadap Perekonomian Di Indonesia (2022)	2022
7.	Jessy Tantriangela, Milla Sepliana Setyowati	Penajaman Konsep Literasi Perpajakan Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan (2023)	2023, Maret
8.	Muh. Afdal Yanuar	Optimalisasi Penerapan <i>Automatic Exchange Of Information</i> (AEOI) Dalam Mendorong Pendapatan Negara Atas Pungutan Pajak Penghasilan (2023)	2023, April
9.	Aidicha Berliana Shovie Anggraeny, Rahmat Agus Santoso	Analisis Tingkat Literasi Keuangan dan Literasi Perpajakan Pengelola UMKM (2023)	2023, Juni
10.	Istiarti Primadini, Gunadi	Analisis SWOT Terhadap Kebijakan Pajak Digital di Indonesia	2023, Juni

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Terkait dengan hasil analisis dan pembahasan, maka kami akan secara terperinci menjelaskan bagaimana peran perpajakan dapat memiliki dampak yang substansial terhadap pencapaian SDGs 8 guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Analisis ini menyoroti hubungan kompleks antara sistem



perpajakan dengan konteks pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, pembaca akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran perpajakan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan serta implikasinya terhadap ekonomi yang berkelanjutan.

Artikel ini membandingkan 10 penelitian terdahulu terkait dengan permasalahan yang dibahas. Penyajiannya disusun dalam bentuk tabel untuk memudahkan pembaca dalam membandingkan hasil observasi yang telah dilakukan

**Tabel 2. Daftar Tabel Rujukan**

No.	Judul Jurnal	Peneliti	Populasi & Sampel	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokan, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap <i>Tax Evasion</i>	Theo Kusuma Ardyaksa, Kiswanto (2014, November)	Peneliti menggunakan populasi wajib pajak bagi orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Pati dengan domisili Kabupaten Pati. Untuk sampel yang digunakan berjumlah 104 kuesioner.	Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwasannya ketepatan untuk pengalokasian pengeluaran maupun teknologi informasi dari perpajakan memiliki pengaruh secara negatif. Hasil lainnya juga menyatakan bahwasannya kelima variabel memiliki pengaruh simultan pada penggelapan pajak. Ketika penggelapan pajak menjadi umum maka penerimaan pajak pemerintah berkurang sehingga dapat berakibat pada menghambatnya pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
2.	Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	Arfah Habib Saragih (2018)	Data penerimaan pajak provinsi sebanyak 34 Provinsi yang berlokasi di Indonesia dengan rentang waktu periode mulai dari tahun 2013 hingga 2016.	Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwasannya penerimaan pajak provinsi memiliki pengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan untuk periode yang dimulai pada tahun 2013 hingga 2016 dengan diiringi dukungan yang berkesinambungan penerimaan pajak.
3.	<i>Does Taxation Of Digital Financial Services Adversely Affect The Financial Inclusion</i>	Peterson K. Ozili (2018, Desember)	-	Keuangan digital terutama perpajakan melalui Fintech memberikan dampak positif untuk inklusi keuangan di negara-negara berkembang dan maju.



<i>Agenda? Lessons From a Developing Country</i>				
4.	Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional	Lili Marlinah (2021)	-	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan memberikan insentif perpajakan kepada UMKM adalah memberikan UMKM tersebut kesempatan untuk tetap bergerak selama masa pandemi. Dengan berbagai program yang diselenggarakan pemerintah maka diharapkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia dapat tetap bertahan keberlangsungannya di masa depan.
5.	<i>Early Tax Education: Could It Change The Future Compliance Behavior</i>	Albert Albert, Rien Agustin Fadjarenie (2022, Desember)	Populasi yang dipergunakan yakni siswa SMP hingga SMA di Jakarta. Untuk sampel yang digunakan sebanyak 719 siswa.	Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan sejak dini memiliki dampak yang positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama pada individu yang telah menerima pembelajaran tentang perpajakan.
6.	Perspektif Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun Dalam Konsep dan Kontribusi Perpajakan Terhadap Perekonomian Di Indonesia	Irgi Iqbal, Hendra Hendra (2022)	-	Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya perpajakan memiliki konsep maupun kontribusi guna meningkatkan perekonomian secara adil terutama di Indonesia. Hal ini dikarenakan pemerintah mengenakan pajak secara proporsional sesuai dengan tingkat kekayaan atau harta yang dimiliki oleh individu atau entitas.
7.	Penajaman Konsep Literasi Perpajakan Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan	Jessy Tantriangel a, Milla Sepliana Setyowati (2023, Maret)	-	Penelitian ini menyatakan bahwa literasi perpajakan mampu meningkatkan komitmen wajib pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan dalam membayar serta



---

8.	Optimalisasi Penerapan <i>Automatic Exchange Of Information</i> (AEOI) Dalam Mendorong Pendapatan Negara Atas Pungutan Pajak Penghasilan	Muh. Afdal Yanuar (2023, April)		melaporkan pajak demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya sistem perpajakan yang di dalamnya terdapat Automatic Exchange of Information mempunyai peranan penting sebagai salah satu alat untuk mengatasi potensi terjadinya upaya penghindaran pajak.
9.	Analisis Tingkat Literasi Keuangan dan Literasi Perpajakan Pengelola UMKM	Aidicha Berliana Shovie Anggraeny, Rahmat Agus Santoso (2023, Juni)	Terkait dengan populasi yang dipergunakan untuk menunjang penelitian yakni UMKM yang mewakili berbagai sector yang berlokasi di Kota Gresik. Untuk sampel yang dipergunakan berjumlah 100 responden.	Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya pelaku UMKM tepatnya yang berlokasi di Kota Gresik memiliki pengetahuan dasar tentang literasi keuangan dan perpajakan, namun mereka masih memerlukan peningkatan dalam keterampilan dalam mengelola keuangan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan mempertimbangkan perhitungan Matriks IFAS, EFAS, dan diagram Kartesius pemerintah telah memilih untuk mengadopsi strategi bertahan (Strategi WO/Weakness Opportunity) sebagai upaya untuk mendukung kesuksesan, terutama dalam menghadapi perpajakan digital dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.
10.	Analisis SWOT Terhadap Kebijakan Pajak Digital di Indonesia	Istiarti Primadini, Gunadi (2023, Juni)		

---



## **1. Kontribusi Perpajakan terhadap Pencapaian Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs 8)**

Berdasarkan analisis perbandingan pada tabel di atas, mayoritas penelitian menyimpulkan bahwasannya perpajakan memiliki pengaruh secara signifikan dalam mencapai SDGs 8 serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Penelitian ini mendukung temuan dari Sutanto et al (2022) dan Nikmah (2021) bahwa perpajakan memiliki pengaruh terhadap SDGs 8 dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan secara positif. Dalam hal ini perpajakan memiliki peranan penting bagi suatu negara terutama untuk mencapai SDGs 8 serta untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Bentuk kontribusi perpajakan demi terwujudnya SDGs 8 berupa pendanaan program-program kesejahteraan sosial untuk membantu mengurangi tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan infrastruktur. Namun, penting untuk diingat bahwa kontribusi perpajakan juga berpotensi membawa dampak yang merugikan apabila tidak dikelola secara efektif, termasuk dalam hal beban pajak yang berlebihan yang mungkin menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, peran serta sumbangan perpajakan dalam pencapaian SDGs 8 harus dianalisis secara cermat, dengan mempertimbangkan konteks khusus masing-masing negara dan harus selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

## **2. Dampak Perpajakan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan**

Dari 10 artikel perbandingan, juga terdapat 3 artikel yang memberikan pemahaman terkait dengan literasi digital dimana literasi digital tersebut memegang peranan penting dan menjadi salah satu kunci agar perpajakan yang dijalankan dalam suatu negara dapat berjalan secara efektif dan adil. Dari hal tersebut, apabila perpajakan yang dijalankan telah sesuai maka perpajakan dapat mendorong terwujudnya SDGs 8 maupun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Peningkatan literasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dapat menjadi faktor penting. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan terkait dengan perpajakan yang dimulai sejak dini dapat berdampak positif pada perilaku kepatuhan wajib pajak, yang pada gilirannya dapat mendukung sistem perpajakan yang stabil dan berkelanjutan. Selain itu, meningkatnya komitmen wajib pajak melalui literasi perpajakan juga dapat berkontribusi pada penerimaan pajak yang lebih baik, yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dengan demikian, upaya peningkatan literasi perpajakan serta kepatuhan wajib pajak perlu ditingkatkan kembali sehingga dapat mendorong terwujudnya tujuan pembangunan yang berkelanjutan SDGs 8 dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perpajakan memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan adanya penerapan pajak mendukung pembangunan ekonomi secara inklusif maupun berkelanjutan. Dengan demikian, maka dapat diindikasikan bahwasanya dengan adanya perpajakan bisa menghasilkan pendapatan yang dapat dipergunakan untuk mendanai proyek pembangunan mulai dalam dunia pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga layanan dasar lainnya guna mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 8.

## **KESIMPULAN**



Artikel penelitian yang telah kami lakukan dengan judul "Kajian Literatur: Pengaruh Perpajakan Untuk Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Mewujudkan SDGs 8" telah mengungkap beberapa temuan penting. Artikel ini membahas bagaimana sistem perpajakan yang efisien dapat berperan penting sebagai kunci dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 8, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Artikel penelitian kami juga menyoroti terkait dengan literasi tentang perpajakan. Dimana literasi perpajakan tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban perpajakan, tetapi juga membangun kesadaran para wajib pajak akan pentingnya membayar dan melaporkan pajak. Dengan pemahaman yang baik terkait sistem perpajakan, masyarakat dapat mematuhi aturan pajak yang berlaku dengan lebih baik, menciptakan basis pajak yang lebih stabil dan dapat diandalkan. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak ini pada akhirnya dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menyediakan sumber daya finansial yang diperlukan guna membiayai program-program pembangunan serta proyek-proyek infrastruktur. Dengan demikian, literasi perpajakan tidak hanya menjadi kunci untuk meningkatkan penerimaan pajak, namun juga sebagai fondasi yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan sebelumnya maka kajian literatur ini menggarisbawahi bahwasannya perpajakan yang cerdas dan seimbang tergolong sebagai salah satu peranan penting guna mewujudkan SDGs 8, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal tersebut mengacu pada pentingnya sistem perpajakan di suatu negara apabila dirancang dengan baik dan efisien maka akan berdampak positif yakni dapat mendukung pembangunan ekonomi secara inklusif maupun berkelanjutan. Dengan demikian, maka dapat diindikasikan bahwasanya dengan adanya perpajakan bisa menghasilkan pendapatan yang dapat dipergunakan untuk mendanai proyek pembangunan mulai dalam dunia pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga layanan dasar lainnya guna mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 8.

Harapan untuk penelitian selanjutnya dapat disertai dengan studi kasus terkait negara-negara yang telah memiliki keberhasilan dalam mengimplementasikan perpajakan guna mewujudkan SDGs 8. Selain itu juga bisa disertai dengan adanya contoh konkret bagaimana perpajakan dalam suatu negara tersebut dapat tercapai sehingga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan juga dapat tercipta.

## REFERENSI

- Albert, A. (2022, Desember). Early Tax Education: Could It Change The Future Compliance Behavior. *International Journal of Evaluation and Research In Education (IJERE)*, 11(4).  
<https://ijere.iaescore.com/index.php/IJERE/article/view/22241#:~:text=The%20results%20revealed%20that%20early,who%20had%20received%20tax%20learning>.
- Anggraeny, A. B. (2023, Juni). Analisis Tingkat Literasi Keuangan dan Literasi Perpajakan Pengelola UMKM. *Journal Of Trends Economics And Accounting Research*, 3(4).  
<https://journal.fkpt.org/index.php/jtear/article/view/652>



- Ardyaksa, T. K. (2014, November). PENGARUH KEADILAN, TARIF PAJAK, KETEPATAN PENGALOKASIAN, KECURANGAN, TEKNOLOGI DANINFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP TAX EVASION. *Accounting Analysis Journal*, 3. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/4209/3876>
- Brundtland, G. H. (2022, October 2). 1987: *Brundtland Report*. Retrieved September 5, 2023, from [https://www-are-admin-ch.translate.goog/are/en/home/media/publications/sustainable-development/brundtland-report.html?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://www-are-admin-ch.translate.goog/are/en/home/media/publications/sustainable-development/brundtland-report.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc)
- Hoffman, W. H., Raabe, W. A., Young, J. C., Nellen, A., & Maloney, D. M. (2017). *South-Western Federal Taxation 2018: Corporations, Partnerships, Estates and Trusts 2018*. Cengage Learning.
- Iqbal, I. (2022). Perspektif Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun Dalam Konsep dan Kontribusi Perpajakan Terhadap Perekonomian Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing*, 3(2). <https://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jaka/article/view/8851>
- Marlinah, L. (2021). Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ikraith-Ekonomika*, 4(2). <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/view/1019/805>
- Ozili, P. (2018, Desember). Does Taxation Of Digital Financial Services Adversely Affect The Financial Inclusion Agenda? Lessons From a Developing Country. *Borsa Instabul Review*, 18. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214845017301503>
- Pengertian Pajak*. (n.d.). Ditjen Pajak. Retrieved September 5, 2023, from <https://pajak.go.id/id/pajak>
- Primadini, I. (2023, Juni). Analisis SWOT Terhadap Kebijakan Pajak Digital di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan (JRAP)*, 10(1). <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap/article/view/4647>
- Saragih, A. H. (2018). PENGARUH PENERIMAAN PAJAK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *JURNAL SISTEM INFORMASI, KEUANGAN, AUDITING DAN PERPAJAKAN*, 3. <https://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/sikap/article/view/103>
- SR, S. (2007). *Perpajakan : pendekatan komprehensif*. Salemba Empat.
- Sutanto, Y., Madeline, I. L., & Patricia, E. (2022). Penerapan “lean thinking” dalam perpajakan dan manajemen untuk mencapai SDG di era super smart society 5.0. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen*, 18 (03). <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/11188>
- Tantriangela, J. (2023, Maret 15). Penajaman Konsep Literasi Perpajakan Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 9(1). <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jurnalakundanbisnis/article/view/9109/4873>



- United Nations. (n.d.). *Goal 8 | Department of Economic and Social Affairs. Sustainable Development Goals*. Retrieved September 4, 2023, from <https://sdgs.un.org/goals/goal8>
- Yanuar, M. A. (2023, April). Optimalisasi Penerapan Automatic Exchange Of Information (AEOI) Dalam Mendorong Pendapatan Negara Atas Pungutan Pajak Penghasilan. *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 4(2). <https://ejurnal.pajak.go.id/st/article/view/320/97>